

Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi

Dewi Ernita ^{1*}

^{1*} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Indonesia.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan secara parsial dan simultan. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi desentralisasi fiskal, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau Kementerian Keuangan (DJPK). Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil adalah: 1) Tidak terdapat pengaruh signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap kemiskinan yang dibuktikan dengan nilai thitung $-5,721 < t_{tabel} 2,131$. 2) Tidak terdapat pengaruh signifikan antara dana perimbangan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi yang dibuktikan dengan nilai thitung $1,399 < t_{tabel} 2,131$. 3) Terdapat pengaruh signifikan belanja daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi yang dibuktikan dengan nilai thitung $6,22 > t_{tabel} 2,131$. Kesimpulannya, Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan belanja daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi.

Kata kunci: Kemiskinan; Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Belanja Daerah.

Abstract. This study aims to determine the effect of fiscal decentralization on poverty both partially and simultaneously. It examines factors influencing fiscal decentralization, namely Regional Original Income (PAD), balancing funds, and regional expenditures. The data used in this research are secondary data obtained from the official website of the Directorate General of Fiscal Balance or the Ministry of Finance (DJPK). Based on the discussion results, the conclusions drawn are: 1) There is no significant effect of Regional Original Income on poverty, as evidenced by the t -value of $-5.721 < t_{table} 2.131$. 2) There is no significant effect of balancing funds on poverty in Jambi Province, as evidenced by the t -value of $1.399 < t_{table} 2.131$. 3) There is a significant effect of regional expenditures on poverty in Jambi Province, as evidenced by the t -value of $6.22 > t_{table} 2.131$. In conclusion, Regional Original Income and balancing funds do not have a significant effect on poverty, while regional expenditures have a significant effect on poverty in Jambi Province.

Keywords: Poverty; Regional Original Income; Balancing Funds; Regional Expenditures.

* Corresponding Author. Email: dewi.ernita14@gmail.com ^{1*}.

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2690>

Received: 18 June 2024, Revision: 24 June 2024, Accepted: 30 June 2024, Available Online: 10 July 2024.

Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204.

Copyright © 2024. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan Riset).

Pendahuluan

Dalam upaya menurunkan kemiskinan, pemerintah perlu meningkatkan kualitas ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Salah satu langkah mendasar yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur sebagai implementasi dari desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan, pelayanan, daya saing daerah, dan partisipasi aktif masyarakat (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2021). Kebijakan desentralisasi fiskal diukur melalui tiga indikator utama: pendapatan berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer daerah berupa dana perimbangan, dan pengeluaran berupa belanja daerah (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2021).

Menurut Mookherjee (2006) dalam bukunya tentang desentralisasi dan dampaknya pada pengentasan kemiskinan, desentralisasi dapat membawa manfaat dalam hal efisiensi dan keadilan, tetapi juga menekankan risiko yang terkait dengan kurangnya kapasitas dan akuntabilitas di tingkat lokal. Peningkatan indikator desentralisasi fiskal dari tahun ke tahun diharapkan dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kualitas ekonomi serta pendidikan, yang pada akhirnya akan mengentaskan kemiskinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan secara parsial maupun simultan? Kedua, berapa besar pengaruh desentralisasi fiskal secara parsial maupun simultan? Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan baik secara parsial maupun simultan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya desentralisasi fiskal dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. Melalui

penelitian ini, diharapkan dapat diberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal adalah kebijakan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan sumber daya secara mandiri. Studi oleh Putra (2019) menunjukkan bahwa dana desa memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di daerah, sedangkan penelitian oleh Arham (2014) menyoroti bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi ketimpangan antar kabupaten/kota. Selain itu, penelitian Santi dan Iskandar (2021) menegaskan adanya hubungan negatif antara kebijakan desentralisasi fiskal dengan ketimpangan wilayah, sementara Anggita dan Sari (2021) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian Adriawan *et al.* (2022) yang menyoroti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan.

Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti efektivitas pengelolaan dana daerah, investasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Provinsi Jambi. Dinarjito dan Dharmazi (2020) menunjukkan bahwa investasi dan indeks pembangunan manusia juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu, pemahaman mengenai implementasi desentralisasi fiskal dan dampaknya terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan strategi pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Jambi.

Tinjauan Literatur

Penyebab Kemiskinan

Menurut Todaro dan Smith, kemiskinan terjadi karena adanya interaksi antara beberapa

karakteristik berikut: pertama, tingkat pendapatan nasional di negara-negara berkembang masih rendah dan laju pertumbuhan ekonomi masih lambat. Kedua, negara berkembang memiliki pendapatan per kapita yang rendah dan laju pertumbuhannya sangat lambat, bahkan sering mengalami stagnasi. Ketiga, distribusi pendapatan yang tidak merata menambah permasalahan kemiskinan di negara-negara ini. Keempat, mayoritas kemiskinan yang dialami di negara berkembang adalah kemiskinan absolut. Kelima, ketersediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan masih terbatas dengan kualitas yang rendah, yang menyebabkan masyarakat banyak mengalami gizi buruk dan penyakit, serta tingkat kematian bayi yang tinggi. Keenam, fasilitas pendidikan di negara berkembang memiliki kualitas yang relatif rendah dan kurikulum yang diterapkan kurang relevan (Todaro & Smith, 2011).

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pelayanan publik, memanfaatkan sumber daya alam lebih efisien, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi fiskal juga dapat dipahami sebagai pelimpahan kewenangan pengelolaan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, namun tetap diikuti dengan transfer dana oleh pemerintah pusat (Hastuti, 2018).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengukuran desentralisasi fiskal dari pendekatan pendapatan tercermin pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Kementerian Keuangan, PAD merupakan penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengumpulkan dana yang kemudian akan digunakan untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Sumber-sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan, 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat desentralisasi fiskal suatu daerah. PAD mencerminkan penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan pembangunan daerah. Sumber-sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya (Hidayah & Wahyunengseh, 2021). Pengentasan kemiskinan melalui pendekatan PAD dapat melibatkan berbagai pendekatan, seperti Teori Marxis, Teori Budaya Kemiskinan, Teori Neo-konservatif, dan Teori Sosial Demokrasi Kemiskinan (Hidayah & Wahyunengseh, 2021). Pertumbuhan Ekonomi menekankan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan (Arofah & Sishadiyati, 2022). Sementara Lingkaran Kemiskinan, seperti yang diungkapkan oleh Nurkse dan Myrdal, bahwa keterbelakangan dan ketertinggalan dapat menjadi faktor pemicu kemiskinan yang sulit diputus mata rantainya (Nurjihad & Dharmawan, 2016).

Pendapatan Transfer

Transfer ke daerah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana transfer ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, serta mengurangi kesenjangan pelayanan publik yang ada di setiap daerah. Transfer daerah terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang juga disebut dana perimbangan (Sumber-Sumber Penerimaan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, n.d.).

PDRB per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai bersih atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan di suatu daerah. PDRB per kapita dapat dihitung dengan cara membagi PDRB harga konstan dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Peningkatan PDRB per kapita diharapkan dapat memecahkan masalah seperti

kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Berdasarkan PDRB per kapita, dapat diketahui besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu daerah. Semakin besar PDRB per kapita, semakin tinggi tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk di daerah tersebut (Fatimah, 2017).

Hubungan Antara PAD dan Kemiskinan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialokasikan secara optimal dapat mengurangi tingkat kemiskinan. PAD yang semakin besar dan merata mendorong kemampuan daerah untuk menggali potensi dari berbagai sektor. Hal ini akan meningkatkan daya tarik daerah untuk menarik investor, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menurunkan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Koto (2016) dan Meilen Gresi Paseki, Amran Naukoko (2014) mendukung pernyataan bahwa peningkatan PAD akan mengurangi jumlah penduduk miskin karena alokasi PAD dapat digunakan untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan.

Hubungan Antara DAU dan Kemiskinan

Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk membantu daerah dalam pendanaan keuangan agar tidak terjadi kesenjangan fiskal antar daerah. Pemerataan fiskal melalui DAU akan meningkatkan pelayanan publik yang merata antar daerah, yang akan menghambat penyebab kemiskinan. Todaro dan Smith menyatakan bahwa peningkatan pelayanan dan fasilitas publik, terutama di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, dapat menurunkan kemiskinan. Penelitian oleh Amami dan Asmara (2022) serta Ismail dan Hakim (2014) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, yaitu peningkatan DAU akan menurunkan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendanaan pembangunan pelayanan publik.

Hubungan Antara DAK dan Kemiskinan

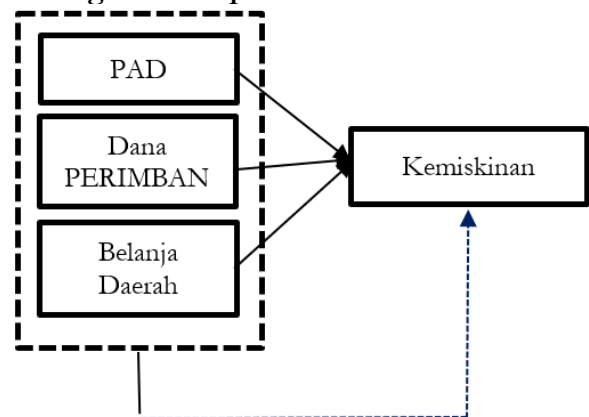
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bentuk implementasi desentralisasi fiskal berupa transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. DAK digunakan untuk membiayai kegiatan khusus baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan

daerah. Dengan adanya DAK, pemerintah daerah dapat mempercepat target pembangunan infrastruktur nasional. Kemajuan infrastruktur akan memudahkan akses pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan standar hidup masyarakat dan menurunkan kemiskinan. Penelitian oleh Basyir dkk. (2015) dan Rhokayyah & Widyanti (2019) mendukung pernyataan bahwa peningkatan DAK akan menurunkan kemiskinan dengan meningkatkan pelayanan publik melalui kegiatan pembangunan.

Hubungan Antara PDRB Per Kapita dan Kemiskinan

PDRB per kapita adalah PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut, yang mencerminkan rata-rata pendapatan masyarakat. Peningkatan PDRB per kapita berarti peningkatan standar hidup masyarakat, yang akan mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan. Todaro dan Smith menyatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah pendapatan per kapita yang rendah, sehingga peningkatan PDRB per kapita akan menurunkan kemiskinan. Penelitian oleh Fatimah (2017) dan Dwiarmojo (2017) menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan per kapita masyarakat akan meningkatkan konsumsi dan pemenuhan kebutuhan pokok, yang pada gilirannya akan menurunkan kemiskinan.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Dalam desentralisasi fiskal di Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi

Khusus (DAK) memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Pendapatan Asli Daerah yang dialokasikan secara optimal, Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk pemerataan fiskal, dan Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur semuanya berperan dalam mengurangi kemiskinan. Peningkatan PDRB per kapita juga berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan dengan meningkatkan standar hidup masyarakat. Penelitian ini mendukung pentingnya kebijakan desentralisasi fiskal sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi. Dengan demikian, implementasi kebijakan desentralisasi fiskal yang efektif diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah yang membutuhkan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme spesifik dari setiap indikator desentralisasi fiskal dan bagaimana mereka dapat dioptimalkan untuk hasil yang lebih maksimal.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, dan laporan-laporan pemerintah terkait lainnya. Data yang digunakan mencakup periode waktu tertentu yang relevan dengan penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi, dengan sampel yang diambil secara purposive sampling, di mana semua kabupaten dan kota di Provinsi Jambi yang memiliki data lengkap tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan tingkat kemiskinan selama periode penelitian dijadikan sebagai sampel.

Data dikumpulkan melalui dokumentasi dari

sumber-sumber resmi, dengan langkah-langkah pengumpulan data meliputi mengunduh dan mengumpulkan data dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, melakukan verifikasi dan validasi data untuk memastikan keakuratannya, serta menyusun data dalam format yang sesuai untuk analisis lebih lanjut. Variabel-variabel yang diteliti meliputi variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diukur sebagai penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dana Alokasi Umum (DAU) diukur sebagai dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurangi ketimpangan fiskal, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diukur sebagai dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus baik fisik maupun nonfisik.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan. Langkah-langkah analisis data meliputi uji asumsi klasik seperti uji normalitas untuk memastikan data berdistribusi normal, uji multikolinearitas untuk memastikan tidak ada hubungan linear yang sempurna antar variabel independen, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan varians residual dari regresi konstan. Model regresi yang digunakan adalah $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$, di mana Y adalah tingkat kemiskinan, α adalah konstanta, β_1 , β_2 , β_3 adalah koefisien regresi variabel independen, X_1 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), X_2 adalah Dana Alokasi Umum (DAU), X_3 adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), dan ϵ adalah error term. Uji hipotesis dilakukan dengan uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji F untuk menguji pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel

dependen. Prosedur penelitian meliputi perencanaan penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi serta pelaporan hasil. Dalam tahap perencanaan, topik dan masalah penelitian ditentukan, serta tujuan penelitian dan hipotesis dirumuskan. Data dikumpulkan dari sumber resmi dan diverifikasi serta divalidasi sebelum dianalisis. Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan regresi linier berganda, kemudian uji hipotesis dilakukan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Hasil penelitian kemudian diinterpretasikan dan dilaporkan sesuai dengan temuan dan analisis yang dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Alat analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan persamaan

$Y=\alpha+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\beta_3X_3+\mu$. Koefisien determinasi (Kd) dihitung sebagai $Kd=r^2\times100\%$ dan $Kd=\beta\times\text{zero order}\times100\%$. Uji hipotesis dilakukan dengan uji t dan uji F untuk menentukan signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara individual, sementara uji F digunakan untuk menguji pengaruh semua variabel independen secara simultan. Analisis ini juga melibatkan penghitungan koefisien regresi tidak terstandar dan terstandar, serta tingkat signifikansi statistik, guna memastikan bahwa hasil yang diperoleh valid dan dapat diandalkan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi.

Tabel 1. Koefisien Regresi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations		
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part
1 (Constant)	1137474.404	3169337.339		.359	.738			
PAD	-6.475	11.316	-.259	-.572	.598	.548	-.275	-.154
Dana Perimbangan	16.097	11.509	.813	1.399	.234	.809	.573	.375
Belanja Daerah	3.993	6.418	.265	.622	.568	.742	.297	.167

a. Dependent Variable: Kemiskinan.

Berdasarkan Tabel 1, konstanta (α) mempunyai koefisien sebesar -1.139.474,404. Artinya, jika Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah bernilai nol, maka nilai Belanja Daerah Kota Sungai Penuh sebesar -1.139.474,404. Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -6,475 menunjukkan bahwa apabila PAD meningkat di Kota Sungai Penuh dalam satu tahun, maka akan mempengaruhi nilai dari Belanja Daerah sebesar -6,475. Selanjutnya, nilai koefisien regresi Dana Perimbangan sebesar 16,907 menunjukkan bahwa apabila Dana Perimbangan meningkat di Kota Sungai Penuh dalam satu tahun, maka akan mempengaruhi nilai dari Belanja Daerah sebesar 16,907. Terakhir, nilai koefisien regresi Belanja Daerah

sebesar 3,993 menunjukkan bahwa apabila Belanja Daerah meningkat di Kota Sungai Penuh dalam satu tahun, maka akan mempengaruhi nilai dari Belanja Daerah sebesar 3,993.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat berapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dengan variabel independent PAD (X1) Dana Perimbangan (X2) Belanja Daerah (X3) dan Kemiskinan (Y) sebagai variabel dependent. Untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independent secara parsial. Untuk mengetahui besar pengaruh Pendapatan Asli Darah terhadap Kemiskinan secara parsial dijelaskan dengan rumus koefisien determinasi

sebagai berikut :

$$KD = \beta \times \text{Zero Order} \times 100\%$$
$$= -259 \times 548 \times 100\%$$
$$= -14,193\%$$

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa besar Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Kemiskinan (Y) seacara parsial adalah -14.193%. Untuk mengetahui besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemiskinan secara parsial dijelaskan dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

$$KD = \beta \times \text{Zero Order} \times 100\%$$
$$= 813 \times 809 \times 100\%$$
$$= 65,771\%$$

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh dana Perimbangan (X2) terhadap Kemiskinan (Y) seacara parsial adalah 65,771% Untuk mengetahui besar pengaruh

Belanja Daerah terhadap Kemiskinan secara parsial dijelaskan dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

$$KD = \beta \times \text{Zero Order} \times 100\%$$
$$= 265 \times 742 \times 100\%$$
$$= 19,663\%$$

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh Belanja Daerah (X2) terhadap Kemiskinan (Y) seacara parsial adalah 19,663%. Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) Belanja Daerah (X3) terhadap Kemiskinan (Y). Untuk mengetahui besar nya Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Belanja Daearh terhadap Kemiskinan Provinsi Jambi secara simultan dengan menggunakan teknik analisis statistik yang sudah di tentukan semula, maka dapat di jelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Hasil Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.844 ^a	.712	.496	745919.69165	.712	3.294	3	4	.140

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, PAD, Dana Perimbangan.

Nilai R Square adalah persentase kontribusi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Belanja Daerah terhadap terhadap Provinsi Jambi dengan 0,712 yang merupakan kuadrat dari koefisien korelasi 0,712. Hal ini mengandung arti bahwa

pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1), Dana Perimbangan (X2) Belanja Daerah (X3) secara simultan terhadap variabel Kemiskinan (Y) adalah sebesar 71,2%.

Tabel 3. Hasil Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1137474.404	3169337.339		.359	.738
	PAD	-6.475	11.316	-.259	-.572	.598
	Dana Perimbangan	16.097	11.509	.813	1.399	.234
	Belanja Daerah	3.993	6.418	.265	.622	.568

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai t-hitung untuk variabel Pendapatan Asli Daerah -572 dan Dana Perimbangan 1.399 belanja Daerah 622 dan t-tabel df = n – k-1 (8 – 3 - 1 = 4) adalah sebesar 2.776. berdasarkan cara

pengambilan keputusan uji parsial (uji t) di atas dapat disimpulkan

- 1) Hasil uji hipotesis pada Pendapatan Asli Daerah (X1)
Untuk melihat pengaruh pada variabel

Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Kemiskinan (Y) adalah nilai thitung $-572 < 2.131$, menggunakan uji t dua arah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan Provinsi jambi

2) Hasil uji hipotesis pada variabel Dana Perimbangan (X2)

Untuk melihat pengaruh pada variabel Pendapatan Asli Daerah (X2) terhadap Belanja Daerah (Y) nilai thitung $1.399 < 2.131$. dengan menggunakan uji t dua arah sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 Terima dan H_2 tolak artinya Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Perimbangan terhadap Kemiskinan Provinsi Jambi

3) Hasil uji hipotesis pada variabel Belanja daerah (X3)

Untuk melihat pengaruh pada variabel Belanja Daerah (X3) terhadap Kemiskinan

(Y) nilai thitung $622 > 2.131$. dengan menggunakan uji t dua arah sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 tolak dan H_2 terima artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja daerah terhadap Kemiskinan Provinsi Jambi

Dari hasil analisis data penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan ,Belanja Daerah juga tidak berpengaruh signifikan dan Belanja Daerah Berpengarus Singnifikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi

Uji F

Untuk melihat uji Hipotesis secara simultan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi maka dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Analisis Varians ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5497529745511.2013		1832509915170.4013.294		.140 ^b
	Residual	2225584745564.7994		556396186391.200		
	Total	7723114491076.0007				

a. Dependent Variable: Kemiskinan

b. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, PAD, Dana Perimbangan

Untuk melihat pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) dan Belanja Daerah (X3) secara simultan atau secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah Kota Sungai Penuh dapat dilihat dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel, dimana Fhitung sebesar 3.294 sedangkan Ftabel sebesar pada $df_1 = 5$ $df_2 = n-2-1 = 5$ dengan tingkat kepercayaan 0,05% diperoleh nilai Ftabel sebesar 4,74% berarti secara bersama-sama Fhitung $> Ftabel$ $3.294 > 5,050$ berarti H_0 diterima dan H_0 Ditolak bahwa Pendapatan Asli daerah,Dana Perimbangan dan Berlanjadaerah secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan Provinsi Jambi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil olahan data menggunakan *software spss* dapat dilihat secara bersama-sama Pendapatan Aslidaerah Negatif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan. Untuk melihat pengaruh pada variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Kemiskinan (Y) adalah nilai thitung $-5,721 < 2.131$, menggunakan uji t dua arah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 terima dan H_1 ditolak artinya terdapat tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap KemiskinanProvinsi Jambi. Untuk melihat pengaruh pada variabel Dana Perimbangan (X2) terhadap Kemiskinan (Y) nilai thitung $1.399 < 2.131$. dengan menggunakan uji t dua arah sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 terima dan H_2 Ditolak artinya tidak terdapat pengaruh

yang signifikan antara dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan Provinsi Jambi. Untuk melihat pengaruh pada variabel Belanja Daerah (X3) terhadap Kemiskinan (Y) nilai $t_{hitung} 622 > 2.131$. dengan menggunakan uji t dua arah sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kemiskinan Provinsi Jambi. Dari hasil analisis data penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan, Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan dan Belanja Daerah Berpengaruh Signifikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi.

Dari analisis data penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Belanja Daerah secara simultan atau secara bersama-sama Tidak terhadap Belanja Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} , dimana F_{hitung} sebesar 75.908 sedangkan F_{tabel} sebesar pada $df_1 = 5$ $df_2 = n-2-1 = 5$ dengan tingkat kepercayaan 0,05% diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,298% berarti secara bersama-sama $F_{hitung} < F_{tabel}$ $3.298 < 5.050$ berarti H_0 diterima dan H_a ditolak bahwa Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh sangat tidak signifikan terhadap Kemiskinan Provinsi Jambi.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Namun, Belanja Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, namun juga menunjukkan beberapa perbedaan. Penelitian oleh Amami dan Asmara (2022) di Kabupaten Ngawi menemukan bahwa PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian di Provinsi Jambi, di mana PAD dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh kondisi ekonomi dan administrasi yang berbeda di setiap daerah, yang mempengaruhi efektivitas desentralisasi fiskal.

Selain itu, penelitian oleh Dwirandra (2013) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan keserasian belanja daerah sebagai variabel pemoderasi. Hal ini mendukung temuan bahwa belanja daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, karena peningkatan belanja daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan. Penelitian Fatahillah (2019) dan Fatimah (2017) di Provinsi Jambi juga menyoroti pentingnya PDRB dan belanja daerah dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Fatahillah menemukan bahwa PDRB, PAD, DAU, dan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sementara Fatimah menekankan bahwa faktor-faktor ekonomi seperti belanja daerah memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa meskipun PAD mungkin tidak berpengaruh signifikan secara langsung, faktor-faktor ekonomi lainnya yang terkait dengan belanja daerah memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan.

Sebaliknya, penelitian oleh Ismail dan Hakim (2014) di Provinsi Bali menemukan bahwa Dana Perimbangan memiliki peran signifikan dalam mengurangi kemiskinan. Perbedaan temuan ini dengan hasil penelitian di Provinsi Jambi dapat disebabkan oleh perbedaan alokasi dan penggunaan Dana Perimbangan di setiap provinsi, yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan lokal dan prioritas pembangunan. Penelitian oleh Basyir *et al.* (2015) di Aceh juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti PAD, DAU, dan DAK mempengaruhi kemiskinan, namun menekankan bahwa pengelolaan yang efektif dan transparansi dalam penggunaan dana sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini relevan dengan temuan bahwa belanja daerah yang signifikan dapat mengurangi kemiskinan di Provinsi Jambi, asalkan dikelola dengan baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. Begitu pula, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Perimbangan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. Namun, terdapat pengaruh yang signifikan antara Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. Besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Kemiskinan (Y) secara parsial adalah sebesar - 5,721%. Pengaruh Dana Perimbangan (X2) terhadap Kemiskinan (Y) secara parsial adalah sebesar 1,399%. Sedangkan pengaruh Belanja Daerah terhadap Kemiskinan sebesar 622%. Secara simultan, besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), dan Belanja Daerah (X3) terhadap Kemiskinan (Y) adalah sebesar 71,241%.

Daftar Pustaka

- Adila, R., & Marwan. (2020). Pengaruh indeks pembangunan manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. *Jurnal Ecogen*, 3(1), 120. <https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.8531>
- Adriawan, R., Rahman, A., & Iwang, B. (2022). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), 226-234. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10750>
- Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja modal terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngawi. *Jurnal Ekobistek*, 11(2), 48-54. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297>
- Arham, M. (2014). Kebijakan desentralisasi fiskal, pergeseran sektoral, dan ketimpangan antarkabupaten/kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 14(2), 145-167. <https://doi.org/10.21002/jepi.v14i2.437>
- Arofah, F., & Sishadiyati, S. (2022). Peranan mediasi IPM pada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Jember tahun 2010-2020. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 6(2). <https://doi.org/10.23969/oikos.v6i2.5559>
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (2021). *Dua dekade implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Indeks pembangunan manusia 2015*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kemiskinan dan ketimpangan*. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Basyir, A., Hamzah, S., & Syahnur, S. (2015). Faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 57-70.
- BPS Indonesia. (2015). *Indeks pembangunan manusia (metode baru)*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211>
- Dwiatmojo, W. F. (2017). *Analisis tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi tahun 2011-2015*.
- Dwirandra, A. A. N. B. (2013). Pengaruh desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi dengan keserasian belanja daerah sebagai variabel pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 8(2), 66-74.
- Fatahillah, A. G. (2019). *Pengaruh PDRB, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan pendidikan terhadap kemiskinan Provinsi*

Jambi (2012-2017).

Fatimah, A. N. (2017). *Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi*.

Fikri, K., Sudraja, U., & Remofa, Y. (2019). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 58–71.

Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 785–787.
<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snk/article/view/293>

Hidayah, S., & Wahyunengseh, R. (2021). Collaborative governance untuk pengembangan sustainable green tourism sebagai upaya pengentasan kemiskinan (discourse network analysis pada geopark.kebumenkab.go.id). *Wacana Publik*, 1(2), 431.
<https://doi.org/10.20961/wp.v1i2.54604>

Ismail, A., & Hakim, A. (2014). Peran dana perimbangan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 16(9), 2168.
<https://doi.org/10.20885/jabis.vol16.iss9.art8>

Istimal. (2012). Dampak dana alokasi umum (DAU) terhadap kemiskinan di Kota Tangerang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 45–56.

Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apa saja sumber-sumber pendapatan daerah?*
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatandaerah>

Koto, J. (2016). Analisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening. *Economica*, 4(2), 193–216.
<https://doi.org/10.22202/economica.v4i2.633>

Nurjihadi, M., & Dharmawan, A. (2016). Lingkaran setan kemiskinan dalam masyarakat pedesaan: Studi kasus petani tembakau di kawasan pedesaan Pulau Lombok. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 4(2).
<https://doi.org/10.22500/sodality.v4i2.13372>

Putra, H. (2019). Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan di Aceh. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 2(2).
<https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.30>